PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS TIDAR**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGIYARTO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**
3. NHK : **675416**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.620.000.000**

1. Tanah Seluas 287 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 210.000.000
2. Tanah Seluas 1.356 m2 di KAB / KOTA KLATEN, LAINNYA Rp. 360.000.000
3. Tanah Seluas 1.016 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, LAINNYA Rp. 410.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000
5. Tanah Seluas 279 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
6. Tanah Seluas 1.285 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **9.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR MIO J Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **5.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **4.500.000**

F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.638.500.000
III.	HUTANG	Rp.	100.000.000
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.538.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.